

BELAJAR MELALUI PERMASALAHAN PENDIDIKAN BAHASA

Biner Ambarita
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Kita belajar dan memahami menggunakan bahasa. Bahasa adalah objek dasar yang sangat esensial dalam pemaknaan hidup dan kehidupan. Bahasa bukanlah sekedar dialek dan cara berkomunikasi semata, melainkan juga bagian dari cara hidup kelompok sosial. Bahasa menunjukkan bagaimana seseorang atau sekelompok orang berfikir. Bahasa yang digunakan oleh orang atau kelompok akan meneguhkan identitas seseorang atau kelompok tersebut. Bahasa merupakan sesuatu yang hidup dan dinamis dalam energi dan aktivitas manusia. Bahasa bukanlah sesuatu yang berasal dari luar proses aktivitas, namun dari pemanfaatan organik dan pembangkitan dari daya kreatif manusia, sehingga bahasa merupakan pola dan bentuk yang diasumsikan oleh pikiran manusia. Permasalahan pendidikan bahasa memiliki cakupan yang luas terkait pemahaman makna hasil pikiran, alih ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, komunikasi, penamaan dan aturan-aturan dalam kehidupan.

KATA KUNCI : Belajar, pendidikan bahasa

PENDAHULUAN

Arus globalisasi dan keterbukaan serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan yang harus dihadapi dunia pendidikan nasional Indonesia untuk menghasilkan generasi muda yang tangguh dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, perlu dirancang sistem pendidikan nasional mulai dari tingkat pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi yang relevan dengan tuntutan kehidupan dan dunia kerja serta kemajuan ilmu pengetahuan di masa kini dan yang akan datang.

Perubahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung menimbulkan pergeseran nilai dan melahirkan makna ganda dari kebenaran. Pergeseran pandangan dualistik menuju pandangan yang pluralistik, dari filosofi pluralistik menuju konsep yang holistik. Pergeseran filosofi yang terjadi tergantung pada hasil budaya baru yang tercipta. Sementara jarak tidak menjadi kendala utama mengalirnya arus informasi. Dalam keadaan demikian ini, sangat terasa pentingnya peranan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan komparatif dan adaptif, inovatif dan kompetitif, dan mampu berkolaborasi. Sumber daya manusia yang terdidik ini, akan dapat lebih mudah menyerap informasi baru lebih efektif, sehingga mereka mempunyai kemampuan yang handal dalam beradaptasi untuk menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat.

Bahasa adalah objek dasar yang sangat esensial dalam pemaknaan hidup dan kehidupan. Bahasa bukanlah sekedar dialek dan cara berkomunikasi semata, melainkan juga bagian dari cara hidup kelompok sosial. Bahasa menunjukkan bagaimana seseorang atau sekelompok orang berfikir. Bahasa yang digunakan oleh orang atau

kelompok akan meneguhkan identitas seseorang atau kelompok tersebut. Bahasa merupakan sesuatu yang hidup dan dinamis dalam energi dan aktivitas manusia. Bahasa bukanlah sesuatu yang berasal dari luar proses aktivitas, namun dari pemanfaatan organik dan pembangkitan dari daya kreatif manusia, sehingga bahasa merupakan pola dan bentuk yang diasumsikan oleh pikiran manusia.

Rekomendasi dari UNESCO menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan bahasa dapat berupa (1) kajian pusat bahasa dan manajemen sumberdaya lainnya dalam alih teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki negara-negara maju, (2) pemanfaatan bahasa ibu dalam pembelajaran sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dibangun di atas pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa dan guru, (3) mendukung pendidikan Bilingual dan atau Multi Lingual pada seluruh tingkat pendidikan sebagai alat mempromosikan kesamaan gender maupun sosial dan sebagai elemen kunci dari masyarakat yang beragam secara linguistik, (4) mendukung bahasa sebagai komponen penting dalam pendidikan lintas budaya untuk membangkitkan pemahaman di antara kelompok-kelompok populasi yang berbeda dan menjamin penghargaan terhadap hak asasi.

Wilhelm (1995) menyatakan bahasa suatu bangsa adalah jiwa bangsa itu sendiri, dan jiwa mereka adalah bahasa mereka. Berdasarkan pendapat ini sikap suatu bangsa terhadap bahasanya akan sangat menentukan keberadaan bangsa tersebut di masa mendatang. Kebijakan Jepang untuk mengalihbahasakan seluruh informasi tentang perkembangan Iptek dari negara luar ke dalam bahasa Jepang telah membawa negara Jepang sebagai negara yang diperhitungkan dalam perkembangan Iptek. Kebijakan ini secara otomatis membuka akses yang sebesar-besarnya kepada warga Jepang terhadap Iptek. Sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memberi kontribusi terhadap perkembangan Iptek di Jepang sendiri. Akan berbeda hasilnya jika kebijakan ini tidak diluncurkan, dapat dibayangkan bahwa mereka yang memiliki akses ke perkembangan IPTEKS hanyalah orang yang menguasai bahasa asing saja. Akibatnya kontribusi terhadap perkembangan Iptek akan terbatas.

Bahkan lebih penting lagi bahasa sebagai dasar ilmu pengetahuan terutama peranan bahasa dalam pengembangan metode ilmiah, logika dan epistemologi. Pada zaman modern ini terdapat tokoh-tokoh filsafat modern memiliki penganut yang sangat kuat terhadap berkembangnya filsafat analitika bahasa. Para filsuf mengetahui bahwa berbagai macam problem filsafat dapat dijelaskan melalui suatu analisis bahasa. Sebagai contoh problema filsafat yang menyangkut pertanyaan terkait **keadilan, kebaikan, kebenaran, kewajiban, hakekat** ada (metafisika) dan pertanyaan-pertanyaan fundamental dapat dijelaskan menggunakan metode analisis bahasa. Perhatian filsuf semakin besar terhadap bahasa ketika abad pertengahan yang ditandai dengan tujuh sistem utama yang meliputi **gramatika, dialektika, dan retorika serta quadrivium** yang mencakup **aritmatika, geometrika, astronomi dan musik**. Akar-akar ilmu pengetahuan menjadi sangat jelas dan pemaknaan kebenaran semakin holistik. Antonomi Bertrand Russell dapat menggugurkan tesis filsafat silogisme dari kaum Platonisme dengan analitika bahasa, "Himpunan dari Segala Himpunan".

Bangsa Indonesia cukup merasakan keterbatasan dalam penguasaan dan pengembangan IPTEK sebagai akibat keterkungkungan dalam bahasanya sendiri dan keterbatasan dalam pengembangan visi untuk melahirkan kebijakan pendidikan bahasa. Berbagai hasil pengembangan IPTEK yang berasal dari negara maju cukup menaklukkan kita untuk wajib beradaptasi dan menguasai sosial budaya mereka dan menggeser nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan menjadikan anak-anak bangsa kehilangan identitas. Bila kita tidak menginginkan Indonesia menjadi *nasion* paling bodoh di seluruh Asean dan Asia Timur, bahkan di tengah bangsa-bangsa di dunia,

maka kinerja manajemen dan inovasi kebijakan pendidikan bahasa di seluruh gugusan pendidikan, harus ditingkatkan.

Banyak perubahan-perubahan signifikan terjadi terkait dengan pendidikan bahasa, antara lain: perubahan politik yang mengarah pada perubahan kebijakan pendidikan bahasa; perpindahan penduduk dalam skala besar membawa perubahan dan variasi bahasa di daerah setempat; pengaruh internet yang secara dramatis mempengaruhi penggunaan bahasa dalam berkomunikasi dan juga belajar; akselerasi globalisasi menantang keberadaan identitas-identitas lokal yang berdasar pada bahasa. Untuk itu perlu ditinjau ulang posisi bahasa dalam pendidikan. Dengan menyadari sedemikian besarnya peran bahasa dalam menentukan keberadaan bangsa maka perlu ditinjau bagaimana mengelola segala sumber daya yang terkait dengan pendidikan bahasa. Ketika berbicara tentang pengelolaan sumber daya, maka pembahasan beralih kepada teori yang terkait dengan manajemen. Manajemen dapat dipandang sebagai pengkoordinasian dan pengawasan terhadap kegiatan kerja sehingga pekerjaan tersebut diselesaikan secara efisien dan efektif. Tulisan ini selanjutnya akan mengangkat beberapa isu sekitar kebijakan pendidikan bahasa, dan secara khusus kebijakan Menteri Pendidikan Mashuri Saleh pada tahun 1968 – 1973..

PEMBAHASAN

1. Beberapa Issue dan Masalah Pendidikan Bahasa

a. Bahasa Sebagai Alat Pemersatu Bangsa VS Bahasa Sebagai Pemicu Konflik

Kesadaran tentang pentingnya peran bahasa telah ada sejak dulu. Keyakinan para pemuda di tahun 1928 tentang peran bahasa sebagai alat pemersatu bangsa melatarbelakangi munculnya bahasa sebagai salah satu point dalam Sumpah Pemuda. Di dalam sejarahnya, bahasa Melayu (yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia) bukanlah bahasa etnis besar di tanah air ini. Penuturnya sangat jauh dibanding penutur bahasa etnis lainnya seperti bahasa Jawa dan Sunda. Anton Moeliono menyatakan, pada 1928 populasi orang Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu sebanyak 4,9%, sedangkan bahasa Jawa dan Sunda berturut-turut 47,8% dan 14,5%. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu menggeser bahasa etnis yang kecil dan menggoyangkan bahasa etnis yang besar. Melalui vernakularisasi, bahasa Indonesia menjadi bahasa dari masyarakat baru yang bernama masyarakat Indonesia.

Sesudah merdeka, peranan bahasa Indonesia semakin jelas dan nyata. Dalam pergaulannya dengan bahasa-bahasa yang sudah terlebih dahulu ada di tanah air, identitas bahasa Indonesia semakin mengemuka. Pada era Orde Baru, bahasa Indonesia diajarkan kepada siswa kelas 3 di sekolah dasar. Sekarang ini, siswa taman kanak-kanak pun sudah mendapatkannya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan karena bahasa Indonesia bisa lebih mengindonesia sejak dini. Gebrakan baru pemerintah pada masa Orde Baru ini adalah diberlakukannya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tahun 1972. Sebelum adanya EYD, Bahasa Indonesia yang digunakan masih diwarnai oleh bahasa etnis masing-masing atau unsur lain dari bahasa asing. Pemberlakuan EYD ditujukan untuk mengakomodasi keragaman bahasa yang ditemukan di tanah air ini.

Politik bahasa merupakan masalah yang pelik. Selain bisa mengatasi permasalahan yang nantinya berujung pada kesatuan suatu bangsa, politik bahasa bisa juga memicu konflik antar negara atau antar daerah. **Pertama**, masalah dapat muncul karena adanya ketidakpuasan dari pihak pemakai bahasa atas ketidakmampuan

bahasanya mengikuti tantangan zaman. Pemerintah Filipina mengeluarkan kebijakan dwibahasa. Bahasa Filipino hanya digunakan dalam pengajaran bahasa Filipino dan studi Sosial. Sedangkan bahasa Inggris digunakan dalam mata ajar bahasa Inggris, matematika, dan Sains. Bahasa Filipino hanya digunakan di awal-awal masa pengajaran, dan selebihnya bahasa Inggris. Akibatnya bahasa Filipino sulit berkembang. Ketidakmampuan bahasa Filipino memenuhi tuntutan globalisasi mengakibatkan penguasaan bahasa Inggris semakin meningkat. Identitas kebangsaan negara ini semakin pudar dan terancam krisis.

Kedua, masalah dapat muncul karena adanya kecemburuan sosial dari penutur bahasa etnis kecil terhadap etnis besar. India bekas jajahan Inggris, mengalami resistensi politik dari para pendukung bahasa etnis besar di bagian selatan India (bahasa Dravida dan Bengali) terhadap penggunaan bahasa Hindi sebagai bahasa nasional selain bahasa Inggris. Konstitusi 1950 yang memproklamasikan Hindi sebagai bahasa nasional terpaksa diamendemen untuk menghindari konflik antar etnis. (kasus India). Lebih jauhnya apabila etnis kecil tidak “berdaya” terhadap etnis besar, hal itu bisa mengakibatkan kematian bahasa.

Dalam hal pengajaran, terlihat bahwa bahasa Indonesia tidak kontekstual dengan budaya lokal. Materi yang diajarkan di Pulau Jawa sama dengan materi yang disampaikan di Papua. Kecerobohan lainnya kebanyakan terkait dengan sikap mental para pemakai bahasa yang terkadang kurang lihai menempatkan diri atau kurang bisa berperilaku bijak. Ketika seseorang bertemu dengan sesama etnisnya, tidak salah mereka langsung beralih menggunakan bahasanya sendiri. Akan tetapi ketika kondisi ini terjadi pada lingkungan yang memiliki keberagaman budaya tinggi, secara norma pergaulan, cara seperti itu menunjukkan lemahnya sensitivitas budaya penuturnya di tengah-tengah keberagaman yang sedang ia hadapi. Apabila hal ini terjadi pada level elite, maka bisa memicu terjadinya konflik kepentingan yang eksisnya dapat terlihat dalam power sharing, pendayagunaan aspek ekonomi, dan kedekatan personal. Ekses negatif lainnya terutama, bila etnis minoritas memiliki semangat primordialisme tinggi terhadap etnis mayoritas, yang bisa menimbulkan stereotip terhadap etnis mayoritas dan yang lebih parahnya hal itu bisa mengantarkan pada munculnya resistansi terhadap etnis ini. Secara kasarnya, hal ini menimbulkan kesan imperialisme bahasa dalam bingkai ke-Indonesiaan yang lebih modern.

b. Perlu Kebijakan Pendidikan Bahasa dalam Penamaan Rupabumi

Nama geografis atau nama unsur rupabumi (topografi) baik dalam ucapan dan tulisan lahir dari sejarah kebudayaan manusia sejak manusia berhenti sebagai pengembara (nomaden). Sejak manusia mulai menetap di suatu kawasan tertentu, manusia mulai menamai unsur-unsur rupabumi di sekitarnya sebagai sarana komunikasi dan berkembangnya sistem acuan dalam orientasi dan transportasi. Kini Nama unsur rupabumi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Nama unsur rupabumi digunakan sebagai sarana komunikasi antara bangsa dan negara sejak berkembangnya perpetaan, seperti Peta *Claudios Ptolemaios* (Ptolemy) di abad ke-2 Masehi. Manusia modern tidak dapat lepas dari peta yang memuat semua informasi unsur rupabumi untuk menunjang kegiatan manusia seperti kegiatan perdagangan, eksplorasi, penelitian, perjalanan, bahkan peperangan sekalipun.

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari wilayah daratan dan lautan yang meliputi kurang lebih 17.504 pulau (Depdagri, 2003). Di pulau-pulau tersebut terdapat 726 bahasa daerah (menurut *Summer Institute of Linguistics*). Keanekaragaman bahasa ini sangat berpengaruh dalam tatacara penamaan unsur rupabumi yang dapat

berakibat pada ketidakseragaman penulisan unsur rupabumi di peta. Oleh karena itu, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tanggal 29 Desember 2006, mempunyai wewenang penuh untuk mengatur tatacara pembakuan nama rupabumi. Hal ini sesuai dengan Resolusi PBB No. 4 Tahun 1967 dari *The First UN Conference of Standardization on Geographical Names* di Jenewa yang merekomendasi perlu dibentuknya *National Geographical Names Authority* (lembaga nasional otoritas nama geografis) di tiap negara anggota. Bentuk lembaga otoritas tersebut disesuaikan dengan struktur pemerintahan setempat yang mempunyai tugas dan fungsi pokok pembakuan nama unsur rupabumi, sebagai langkah mendukung pembakuan nama unsur rupabumi di tataran internasional.

Unsur rupabumi umumnya dinamai oleh penduduk setempat dengan menggunakan bahasa daerahnya yang mencerminkan bagian dari sejarah dan kebudayaan suku bangsa yang pertama kali mendiami suatu wilayah. Dalam penamaan unsur rupabumi biasanya mengandung elemen generik yang dapat juga disebut sebagai nama generik dan elemen/nama spesifik. Elemen generik dari suatu nama unsur rupabumi mencerminkan migrasi manusia di masa lalu. Sebagai contoh, istilah *wai* yang artinya “sungai” tidak hanya terdapat di Lampung saja tetapi tersebar mulai dari Pasifik Selatan dalam bahasa Maori, Hawaii, Tonga, dan Maui sampai di kawasan Indonesia seperti di wilayah Papua, Seram, Buru, Nusa Tenggara, dan Lampung. Sehingga nama unsur rupabumi dalam bahasa setempat harus dipertahankan karena merupakan bagian dari sejarah yang panjang dari migrasi manusia di muka bumi. Selain itu elemen spesifik dari nama unsur rupabumi juga penting karena mencerminkan legenda atau mitos dari suku bangsa yang mendiami kawasan tersebut. Dengan demikian tugas Tim Nasional Pembakuan Nama Unsur Rupabumi antara lain melestarikan bahasa dan budaya setempat.

Banyak nama unsur rupabumi di Indonesia belum memiliki nama baik di daratan dan lautan terutama pulau-pulau. Walaupun sebagian dari unsur rupabumi telah memiliki nama namun dalam kenyataannya di lapangan masih beragam dan tidak baku dalam penulisan dan ucapannya. Pada saat ini ditemukan banyak nama unsur rupabumi yang berganti dari bahasa lokal menjadi bahasa yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, banyak digunakan bahasa asing untuk promosi, terutama untuk nama permukiman (*real estate*), sehingga nama asli desanya sudah tidak dikenal lagi. Sudah waktunya pemerintah Indonesia mulai membakukan dan menetapkan nama unsur rupabumi secara nasional, yang bertumpu dari penamaan unsur rupabumi yang dilaksanakan mulai dari tataran desa/kelurahan, sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan.

Prinsip, Kebijakan, dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi ini perlu dipersiapkan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembakuan nama unsur rupabumi di Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian semua lapisan masyarakat termasuk semua jajaran Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah wajib memakai nama **baku** unsur rupabumi secara konsisten dan taat asas dalam semua aktivitasnya.

c. Bahasa – Perkembangan IPTEK

Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Hampir seluruh negara di dunia ini menyertakan pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulumnya. Mengapa ini bisa terjadi? Seluruh negara mempelajari bahasa Inggris sebab bahasa ini membuka jalan bagi mereka beradaptasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dominasi

Inggris dan negara lain penutur bahasa Inggris di bidang Iptek, memaksa negara lain untuk mempelajari bahasa Inggris agar dapat mengakses perkembangan Iptek tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan perkembangan Iptek suatu negara memperkuat kedudukan bahasa suatu bangsa di tingkat internasional. Sebaliknya kebijakan bahasa juga dapat memperkuat perkembangan Iptek suatu bangsa. Kebijakan yang diambil Jepang merupakan contoh untuk kondisi ini. Dengan menerjemahkan seluruh informasi yang terkait dengan perkembangan Iptek dari negara luar ke dalam bahasa Jepang telah membawa negara Jepang sebagai negara yang diperhitungkan dalam perkembangan Iptek. Kebijakan ini secara otomatis membuka akses yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga terhadap Iptek. Sehingga setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memberi kontribusi terhadap perkembangan Iptek di Jepang sendiri. Berdasarkan uraian ini ternyata ada hubungan timbal balik antara bahasa dan perkembangan IPTEK suatu bangsa.

d. Peranan Bahasa dalam Pemecahan masalah Filsafat

Kajian filsuf terhadap bahasa semakin besar. Mereka sadar bahwa kenyataannya banyak persoalan-persoalan filsafat, konsep-konsep filsafat akan menjadi jelas dengan menggunakan analisis bahasa. Tokoh-tokoh filsafat analitika hadir dengan terapi analitika bahasanya untuk mengatasi kelemahan, kekaburan, dan kekacauan yang selama ini ada dalam berbagai macam konsep filosofis dan berdampak pada peletakan makna dan kebenaran.

Kegunaan (peranan) bahasa itu sangat penting dalam pengembangan ilmu bahasa karena filsafat bahasa itu adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakekat bahasa, sebab, asal dan hukumnya. Jadi pengetahuan dan penyelidikan itu terfokus kepada hakekat bahasa termasuk juga perkembangannya.

Pada dasarnya filsafat analitika bahasa meliputi 3 aliran yang pokok, yaitu automisme logis, positivisme logis, dan filsafat biasa. Aliran filsafat biasa inilah yang memiliki bentuk paling kuat bilamana dibandingkan dengan aliran filsafat yang lain, dan memiliki pengaruh yang sangat luas, baik di Inggris, Jerman, dan Perancis maupun di Amerika.

Aliran filsafat bahasa biasa juga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain

- a. Kekaburan makna
- b. Bergantung pada konteks
- c. Penuh dengan emosi dan
- d. Menyesatkan

Untuk mengatasi kelemahan dan demi kejelasan kebenaran konsep-konsep filosofis maka perlu dilakukan suatu pembaharuan bahasa, yaitu perlu diwujudkan suatu bahasa yang sarat dengan logika sehingga ungkapan-ungkapan bahasa dalam filsafat kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Kelompok filsuf ini adalah Bertrand Russell. Menurut kelompok ini tugas filsafat adalah membangun dan mengembangkan bahasa yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam bahasa sehari-hari. Dengan kerangka bahasa yang sedemikian itu kita dapat memahami dan mengerti tentang hakekat fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan dasar tentang metafisis dan realitas dunia yang menjadi perhatian terpenting adalah usaha untuk membangun dan memperbaharui bahasa itu membuktikan bahwa perhatian filsafat itu berkenaan dengan konsepsi umum tentang bahasa serta makna yang terkandung di dalamnya.

Sebagai suatu bidang filsafat khusus, filsafat bahasa memiliki kekhususannya, yaitu masalah yang dibahas berkenaan bahasa. Jadi peranan filsafat bahasa jelas sangat

penting, atau berpengaruh terhadap pengembangan ilmu bahasa. Namun berbeda dengan ilmu bahasa atau lingkungan yang membahas ucapan tata bahasa dan kosa kata, filsafat bahasa lebih berkenaan dengan arti kata dan arti bahasa (semantik). Masalah pokok yang dibahas pada filsafat biasa lebih berkenaan dengan bagaimana ungkapan suatu bahasa itu mempunyai arti sehingga analisis filsafat tidak lagi dianggap harus didasarkan pada logika teknis, baik bagi logika formal maupun matematika, tetapi berfilsafat didasarkan pada penggunaan bahasa biasa. Oleh karena itu mempelajari bahasa biasa menjadi syarat jika ingin membicarakan masalah-masalah filsafat, karena bahasa merupakan alat dasar dan utama berfilsafat.

2. Perlu Manajemen Sumber Daya Sebagai Respon Terhadap Issue

Menyadari kemungkinan terburuk dari berbagai dampak berbagai isu yang suatu saat akan menjadi masalah besar bagi tatanan kehidupan bangsa di masa yang akan datang, perlu adanya penataan dan pengelolaan sumberdaya serta kebijakan pendidikan bahasa yang lebih visioner dalam mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Pemerintah Indonesia perlu cepat tanggap mengantisipasi potensi munculnya konflik, ketertinggalan IPTEKS akibat keterkungkungan bahasa, hilangnya nilai-nilai luhur budaya dan identitas anak bangsa, serta permasalahan teritorial akan muncul akibat ketidakjelasan nama dan pengucapan rupabumi Indonesia.

Menyikapi tantangan zaman atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa persoalan tata istilah, pemaknaan kebenaran, metode ilmiah, epistemologi, pemerintah melalui optimalisasi fungsi sumberdaya pendidikan bahasa terkait SDM, sarana dan prasarana, informasi dan keuangan. Pusat Bahasa sebagai pusat pengkajian analitika bahasa harus proaktif dan kreatif mencari pemecahan masalah bahasa yang berdampak luas pada tatanan kehidupan bangsa, dan membuka kerja sama dengan para pakar dalam disiplin ilmu tertentu menerbitkan berbagai kamus, melakukan alih bahasa IPTEK, melahirkan berbagai kebijakan pendidikan bahasa yang visioner dalam mengatasi permasalahan yang akan terjadi. Bahasa di kalangan etnis-etnis kecil maupun etnis-etnis besar diupayakan untuk dipertahankan. Dalam pelaksanaannya kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia berbeda dari negara-negara lain di dunia.

PENUTUP

3. Kesimpulan

Berdasarkan dasar teori dan analisis filosofi, teori dan praktek pendidikan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

- a. Bahasa suatu bangsa adalah jiwa bangsa itu sendiri, dan jiwa mereka adalah bahasa mereka. Keterkungkungan bangsa dalam bahasanya berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kreatifitas dan produktifitas bangsa tersebut.
- b. Kebijakan-kebijakan yang visioner dalam pendidikan bahasa perlu dilahirkan untuk mengantisipasi berbagai isu dan problema perkembangan IPTEK, pengawasan teritorial, degradasi nilai-nilai luhur budaya, dan peletakan dasar kebenaran dalam kajian filsafat ilmu pengetahuan. Implementasi kebijakan pendidikan bahasa sedini mungkin dapat mengantisipasi peminimalan resiko perubahan yang terjadi.

4. Saran

Perlu dilakukan optimalisasi fungsi sumberdaya pendidikan bahasa dalam implementasi berbagai kebijakan pendidikan bahasa yang dilahirkan merupakan alternatif pemecahan masalah yang akan terjadi. Reorganisasi fungsi lembaga-lembaga dan pusat bahasa diarahkan pada analitika bahasa, identifikasi pada masalah-masalah sosial budaya terkait bahasa, dan penemuan solusi permasalahan berupa kebijakan-kebijakan pendidikan bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurousseau, M. (1957). *The Rendering of Geographical Names*. London: Hutchinson University Library.
- Baroody, A.J. (1993). *Problem solving, Reasoning, and Communicating, K-8. Helping Children think Mathematically*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Departemen Dalam Negeri, (2006). *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang: Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Subdit Toponimi dan Pemetaan.
- Geographical Names Board of Canada, (2001). *Principles and Procedures for Geographical Naming*. Canada: Center for Topographic Information Earth Sciences Sector, Natural Resources.
- Hulukati, E. (2005). *Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP melalui Model Pembelajaran Generatif*. Disertasi Doktor pada PPS UPI.: Tidak Diterbitkan.
- Kaelan, M.S. (1998). *Filsafat Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1993). *Pedoman Umum Pembentukan Elemen*. Jakarta: Balai Pustaka.

UNESCO Education Position Paper. (2003). *Education in a multilingual world*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Widjojo, Muridan S., Benny H Hoed, Mashudi Noorsalim. (2004). Bahasa negara versus bahasa gerakan mahasiswa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sekilas tentang penulis : Drs. Biner Ambarita, M.Pd. adalah dosen pada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Unimed dan sekarang menjabat sebagai Pembantu Rektor III Unimed.